

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN
BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA
(Studi Kasus pada Perusahaan Non-Manufaktur yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016)**

Oleh:

PRASIDHA ANJALI PUTRI

NIM. 135020307111027

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Meraih Gelar Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT KETERANGAN PENELITIAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
RIWAYAT HIDUP	vi
HALAMAN PERUNTUKKAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis.	10
1.5 Sistematika Penelitian	11

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 12

2.1 Tinjauan Pustaka	12
2.1.1 Akuntansi Pajak Penghasilan	12
2.1.2 Beban Pajak Tangguhan	16
2.1.3 Perencanaan Pajak	24
2.1.4 Manajemen Laba	28
2.1.4.1 Motivasi Manajemen Laba	31
2.1.4.2 Teknik Manajemen Laba	33
2.1.4.3 Pengukuran Manajemen Laba	35
2.1.5 Peran Perencanaan Pajak dalam Praktik Manajemen Laba	39
2.1.6 Hubungan Beban Pajak Tangguhan dan Manajemen Laba	40
2.2 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis	41
2.2.1 Kerangka Pemikiran	41
2.2.2 Pengembangan Hipotesis	44
2.2.2.1 Hubungan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba	44
2.2.2.2 Hubungan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba ..	45

BAB III METODE PENELITIAN 48

3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Populasi dan Sampel	48
3.3 Data Penelitian	51
3.3.1 Jenis dan Sumber Data	51
3.3.2 Metode Pengumpulan Data	52
3.4 Variabel Penelitian	52

3.4.1 Variabel Independen	52
3.3.2 Variabel Dependen.....	54
3.5 Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Proses Pemilihan Sampel	58
4.2 Hasil Penelitian	61
4.2.1 Perencanaan Pajak.....	61
4.2.2 Beban Pajak Tangguhan.....	63
4.2.3 Manajemen Laba.....	64
4.3 Statistik Deskriptif	65
4.4 Pengujian Hipotesis.....	67
4.4.1 <i>Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test</i>	67
4.4.2 <i>Overall Model Fit Test</i>	68
4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	69
4.4.4 Uji Simultan (<i>Omnibus Test of Model Coefficient</i>).....	70
4.4.5 Regresi Logistik	71
4.5 Pembahasan.....	72
BAB V PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	76
5.3 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Proses Pemilihan Sampel	58
Tabel 4.2 Daftar Perusahaan yang Menjadi Sampel	59
Tabel 4.3 Hasil Statistik Deskriptif <i>Tax Retention Rate</i> (TRR)	62
Tabel 4.4 Hasil Statistik Deskriptif Beban Pajak Tangguhan	63
Tabel 4.5 Hasil Statistik Deskriptif <i>Scaled Earnings Changes</i>	64
Tabel 4.6 Hasil Statistik Deskriptif <i>Small Profit Firms</i>	65
Tabel 4.7 Hasil Statistik Deskriptif <i>Small Loss Firms</i>	66
Tabel 4.8 Hasil <i>Hosmer and Lemeshow Test</i>	67
Tabel 4.9 Hasil <i>-2 Log Likelihood</i> awal	68
Tabel 4.10 Hasil <i>-2 Log Likelihood</i> akhir	69
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi	70
Tabel 4.12 Hasil <i>Omnibus Test of Model Coefficient</i>	71
Tabel 4.13 Hasil Regresi Logistik	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	43
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penelitian Terdahulu.....	83
Lampiran 2 Perencanaan Pajak	85
Lampiran 3 Beban Pajak Tangguhan	88
Lampiran 4 Manajemen Laba	91
Lampiran 5 Analisis Regresi Logistik Menggunakan SPSS.....	105



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laba merupakan salah satu ukuran yang paling mudah untuk dipertimbangkan oleh pihak internal maupun eksternal dalam mengetahui kinerja suatu perusahaan. Laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan cenderung menjadi dasar dalam pengambilan keputusan baik oleh manajemen perusahaan, investor, kreditor, atau pun para pemangku kepentingan lainnya. Keputusan-keputusan dalam pemberian bonus, pembagian kompensasi, pemberian pinjaman, serta penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan kepada negara umumnya juga didasarkan pada laba yang diperoleh perusahaan.

Baik pihak internal atau pun eksternal perusahaan memiliki berbagai kepentingan yang mungkin saja dapat memunculkan perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan perusahaan, sehingga menimbulkan konflik di antara pihak-pihak tersebut. Jin dan Machfoedz (1998) mengemukakan bahwa terdapat beberapa alasan yang memungkinkan terjadinya pertentangan di antara pihak-pihak tersebut. Pertama, manajemen perusahaan cenderung berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya, namun di lain sisi, pemegang saham cenderung berkeinginan untuk meningkatkan kekayaannya. Kedua, manajemen perusahaan berkeinginan memperoleh kredit sebesar mungkin dengan bunga yang

rendah, sedangkan kreditur hanya ingin memberi kredit sesuai dengan kemampuan perusahaan. Alasan lainnya, yaitu manajemen berkeinginan membayar pajak seminimal mungkin, namun di lain sisi pemerintah ingin memungut pajak semaksimal mungkin.

Konflik yang mungkin terjadi di antara para pemangku kepentingan tersebut, secara teori dapat dijelaskan melalui Teori Keagenan (*Agency Theory*). Teori keagenan berpusat pada hubungan antar pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan sumber daya untuk perusahaan dan bagaimana akuntansi digunakan untuk memfungsikan hubungan tersebut (Deegan, 2006). Hubungan yang dimaksud adalah kontrak di mana satu orang atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk memberikan jasa demi kepentingan *principal* yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada *agent*.

Teori keagenan didasarkan pada asumsi bahwa semua tindakan individu dalam perusahaan dikendalikan oleh kepentingan pribadi mereka. Selain itu, individu akan bertindak oportunistik selama tindakan tersebut akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, perbedaan kepentingan diantara pihak internal dan eksternal perusahaan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara kedua belah pihak.

Konflik kepentingan tersebut akan semakin meningkat ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent* dalam perusahaan, sedangkan

agent memiliki lebih banyak informasi mengenai situasi bisnis, lingkungan kerja, dan keadaan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *agent* dan *principal* yang dikenal juga dengan istilah asimetri informasi. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *agent* dan *principal*, mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh *principal* dan menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal* (Widyaningdyah, 2001).

Hal tersebut dapat menjelaskan kecenderungan manajemen perusahaan untuk memaksimalkan pendapatannya dengan memanfaatkan informasi-informasi yang hanya mereka miliki melalui manajemen laba. Manajemen laba merupakan usaha yang dilakukan manajemen untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (Schipper, 1989).

Salah satu fenomena yang menunjukkan adanya praktik manajemen laba di Indonesia adalah keputusan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan *delisting* secara paksa atas saham PT Inovisi Infracom Tbk. (INVS) pada bulan September 2017. Menurut peraturan BEI, *delisting* secara paksa merupakan salah satu sanksi yang diberikan kepada emiten tercatat yang tidak memenuhi ketentuan sebagai perusahaan tercatat. Sejak tahun 2015, perusahaan yang bergerak di bidang teknologi ini telah mengalami suspensi saham karena ditemukannya indikasi salah saji pada laporan keuangan perusahaan periode September 2014.

Berdasarkan temuan dari BEI, terdapat delapan item dalam laporan keuangan INVS yang harus diperbaiki. Perbaikan yang harus dilakukan INVS meliputi revisi nilai aset tetap, laba bersih per saham, laporan segmen usaha, kategori instrumen keuangan, dan jumlah kewajiban dalam informasi segmen usaha. Selain itu, BEI juga menyatakan adanya salah saji pada item pembayaran gaji kepada karyawan dan penerimaan (pembayaran) utang pihak berelasi dalam laporan arus kas yang dilaporkan.

Sebelum adanya temuan salah saji oleh BEI tersebut, pihak manajemen INVS telah melakukan revisi laporan keuangannya untuk periode Januari hingga September 2014. Beberapa akun pada laporan keuangan revisi tersebut mengalami perubahan yang signifikan, salah satunya adalah penurunan nilai aset tetap sejumlah 1,45 triliun rupiah menjadi 1,16 triliun rupiah setelah revisi. Selain itu, pihak perusahaan mengakui laba bersih per saham berdasarkan laba periode berjalan secara keseluruhan, bukan berdasarkan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Hal ini menyebabkan laba bersih per saham yang dilaporkan perusahaan nampak lebih besar. (<http://www.bareksa.com>)

Menurut studi komparatif yang dilakukan Utami (2005), Indonesia merupakan negara dengan tingkat manajemen laba yang tinggi dibanding beberapa negara lain di dunia. Adanya bukti empiris yang mendukung praktik manajemen laba di Indonesia yang tinggi membuat manajemen laba menarik untuk diteliti lebih dalam. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Phillips *et al.* (2003) yang berfokus

pada beban pajak tangguhan untuk mendeteksi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Yulianti (2005) menjelaskan bahwa beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi atau laba yang diperhitungkan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dengan laba fiskal atau laba yang dihitung sesuai ketentuan perpajakan yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak. Perbedaan temporer atau perbedaan sementara adalah perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan (Suandy, 2008). Perbedaan yang muncul dalam pengakuan laba antara laba akuntansi dan laba fiskal tersebut dapat mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan perpajakan.

Mangoting (1999) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok untuk meminimalkan jumlah pajak terhutang baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai salah satu elemen pengurang laba dalam laporan keuangan, jumlah pajak yang rendah akan mempengaruhi jumlah laba perusahaan secara keseluruhan.

Adanya hubungan langsung antara besaran pajak dengan laba, di mana laba sering digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan oleh pihak yang berkepentingan dalam suatu entitas bisnis, membuat manajemen akan memanfaatkan

peluang untuk melakukan manajemen laba dengan meminimalkan jumlah pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Setiawati (2000) yang mengungkapkan bahwa manajemen sering memanfaatkan peluang untuk memainkan angka laba dalam rangka mempengaruhi hasil akhir dari berbagai keputusan. Contohnya adalah usaha manajemen untuk meminimalkan pajak yang semestinya mereka bayar, dengan cara meningkatkan biaya-biaya akrual sehingga menyebabkan nilai laba lebih rendah.

Cukup banyak penelitian lain yang membahas pengaruh, tidak hanya perencanaan pajak, namun juga beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba, beberapa di antaranya adalah hasil penelitian Holland dan Jackson (2002), Phillips *et al.* (2003), Sumomba (2010), serta Astutik dan Mildawati (2016). Holland dan Jackson (2002) meneliti pengaruh beban pajak tangguhan terhadap adanya indikasi perusahaan melakukan manajemen laba pada 58 perusahaan di Inggris untuk periode dua tahun. Sedangkan, Phillips *et al.* (2003) menguji model akrual dan beban pajak tangguhan untuk mendeteksi praktik manajemen laba pada perusahaan di Amerika Serikat periode 1994-2004. Kedua penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dari beban pajak tangguhan terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan.

Sumomba (2010) meneliti pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba setelah adanya perubahan tarif pajak badan tahun 2009 dan 2010 dengan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitiannya. Hasil penelitian Sumomba (2010) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara beban

pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada tahun 2008, namun pada tahun 2009, variabel beban pajak tangguhan tidak dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba karena adanya perubahan tarif pajak tunggal pada tahun 2010 yang memotivasi manajemen untuk menunda laba tahun 2008 dan mengakui beban lebih awal.

Penelitian lainnya yaitu penelitian Astutik dan Mildawati (2016) berfokus pada perusahaan-perusahaan yang bergerak pada produksi makanan dan minuman (*food and beverages*) yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2012 hingga 2014. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan perusahaan-perusahaan yang menjadi objek untuk melakukan manajemen laba.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat hasil yang cukup beragam atas pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba perusahaan-perusahaan manufaktur, namun belum banyak yang diketahui dari perusahaan non-manufaktur. Menurut Setiowati (2007), perusahaan-perusahaan pada sector non-manufaktur memiliki probabilitas yang lebih tinggi di dalam praktik manajemen laba.

Namun, dari hasil penelitian Aditama (2014) yang menggunakan perusahaan non-manufaktur sebagai obyek menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh

perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan non-manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan mengambil sampel dari tahun 2009-2013.

Hasil penelitian yang cukup beragam dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut memberikan peluang untuk dilakukan penelitian lanjutan baik yang bersifat replikasi atau pun pengembangan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan yang bersifat replikasi dengan judul “Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Non-Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memperoleh bukti empiris apakah terdapat pengaruh dari perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan non-manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan mengambil sampel selama periode tahun 2014 hingga 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan dalam latar belakang, masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh dari perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan non-manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014 sampai 2016?

2. Apakah terdapat pengaruh dari beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan non-manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014 sampai 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perencanaan perpajakan terhadap manajemen laba pada perusahaan non-manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014 sampai 2016.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan non-manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014 sampai 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap hasil dari penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap pihak-pihak yang terkait.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu di bidang akuntansi, khususnya di bidang perpajakan. Hasil penelitian juga dapat memberikan tambahan bukti empiris mengenai praktik manajemen laba perusahaan dengan

menggunakan pendekatan distribusi laba yang dikemukakan oleh Phillips *et al.* (2003).

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal atau pun eksternal perusahaan, untuk memahami praktik manajemen laba yang mungkin dilakukan. Penelitian ini dapat menjadi acuan mengenai bagaimana perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan dapat digunakan sebagai proksi untuk mendeteksi praktik manajemen laba. Hasil penelitian juga dapat berkontribusi untuk membantu pihak-pihak yang berwenang dalam perumusan atau pun pelaksanaan peraturan perpajakan dan memperbaiki praktiknya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi pembahasan mengenai akuntansi pajak penghasilan, pajak tangguhan, perencanaan pajak, manajemen laba, peran perencanaan pajak dalam manajemen laba perusahaan, hubungan beban pajak tangguhan dengan praktik manajemen laba, hasil penelitian-penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

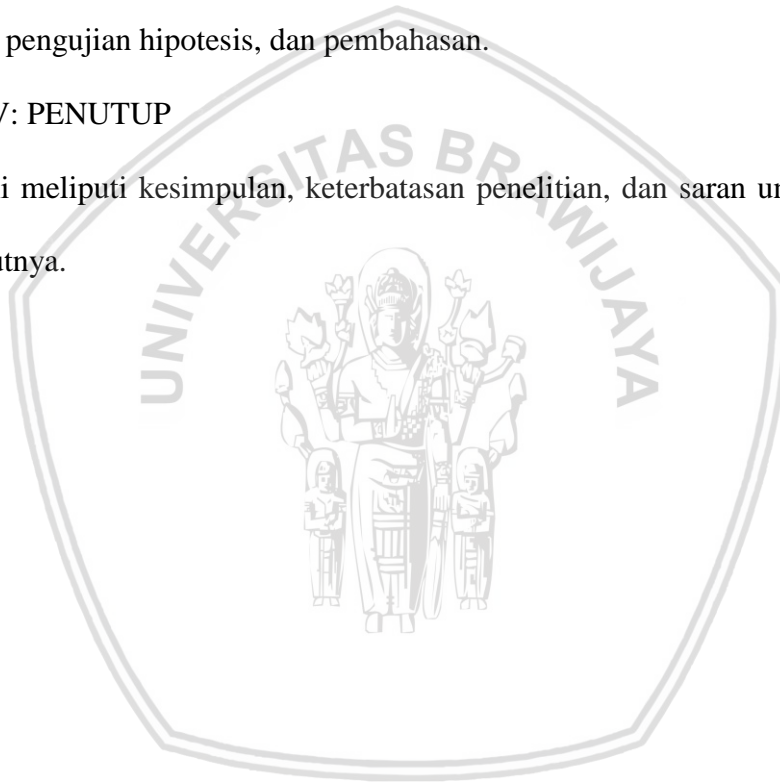
Bab ini membahas mengenai populasi dan sampel, data dan sumber data, variabel penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis data menggunakan statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Akuntansi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan, sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Perihal pajak di Indonesia, sebagai salah satu komponen dalam pelaporan keuangan telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 mengenai Akuntansi atas Pajak Penghasilan yang merupakan adopsi dari *International Accounting Standards* (IAS) 12. Dalam PSAK No. 46 (IAI, 2014) tersebut telah diatur bagaimana suatu entitas melaporkan pajak penghasilannya dalam laporan keuangannya, baik dalam laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya.

Dalam penerapannya, PSAK No. 46 turut mengatur masalah perhitungan pajak yang wajib dibayarkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas tambahan kemampuan ekonomis (laba) yang didapatkan. PSAK No. 46 mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan-perusahaan yang menerbitkan surat berharga untuk diperdagangkan kepada publik atau perusahaan *go public*. Sedangkan

bagi perusahaan-perusahaan yang tidak *go public*, PSAK No. 46 mulai efektif diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001.

Selain itu, Direktorat Jendral Pajak juga mengeluarkan peraturan mengenai perhitungan pajak penghasilan, di mana dasar pengenaan pajak, utamanya pada entitas bisnis didasarkan pada Laporan Keuangan Fiskal. Laporan Keuangan Fiskal yang dimaksud adalah Laporan Keuangan yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, yang kemudian dikoreksi berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan dalam penyajian Laporan Keuangan yang didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan perpajakan, seringkali juga menyebabkan perbedaan pada laba akuntansi (*pretax financial income*) dan penghasilan kena pajak atau laba fiskal (*taxable income*). Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Perbedaan permanen atau perbedaan tetap, yakni perbedaan yang terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut Standar Akuntansi Keuangan atau akuntansi kemersial, namun tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan ini mengakibatkan laba atau rugi bersih menurut akuntansi berbeda secara tetap dengan penghasilan kena pajak atau laba menurut fiskal. Salah satu contoh dari perbedaan tetap adalah penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, dan penghasilan lain yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- b. Perbedaan temporer atau perbedaan sementara, yakni perbedaan yang terjadi karena perbedaan waktu pengakuan atas pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Hal ini terjadi karena suatu biaya atau pendapatan telah diakui menurut akuntansi komersial, namun belum diakui menurut ketentuan perpajakan, atau pun sebaliknya. Perbedaan yang muncul hanya bersifat sementara karena akan tertutup pada periode selanjutnya. Contoh dari perbedaan ini, antara lain yaitu pengakuan piutang tak tertagih dan penyusutan atau amortisasi harta.

Perbedaan temporer atau perbedaan sementara yang muncul dalam penyajian Laporan Keuangan Fiskal menyebabkan timbulnya istilah pajak tangguhan. Hal ini disebabkan, berdasarkan PSAK No. 46, perhitungan pajak di Indonesia menggunakan basis akrual dalam mengakui aset, beban, dan kewajiban perpajakan. Dengan menggunakan basis akrual, setiap penghasilan yang dicatat berdasarkan akuntansi, harus tetap diperhitungkan dampak pajak yang harus dibayarkan di masa mendatang atau pun yang telah dibayarkan di masa sekarang.

Menurut PSAK No. 46, pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan estimasi dari jumlah yang akan dipulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer antara standar akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan, serta akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasi pada periode mendatang. Pajak tangguhan dapat berupa

beban pajak tangguhan (berada di sisi debit) atau manfaat pajak tangguhan (berada di sisi kredit).

Apabila pajak tangguhan berupa beban, maka jumlah pajak terutang atau pajak kini yang harus dibayarkan akan lebih kecil dari jumlah beban pajak. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak harus membayar kekurangannya di masa yang akan datang dan mengakui kewajiban atau liabilitas pajak tangguhan dalam pembukuannya. Sebaliknya, apabila pajak tangguhan berupa manfaat atau pendapatan, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan akan lebih besar dari beban pajak sehingga kelebihannya dapat dikurangkan untuk pajak yang harus dibayar di masa yang akan datang. Dalam hal ini, wajib pajak akan mengakui aset pajak tangguhan.

Sebagaimana dijelaskan pada PSAK No. 46 Nomor 4, aset pajak tangguhan didefinisikan sebagai jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan sementara yang boleh dikurangkan, akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasikan, dan akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan, yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Perusahaan diwajibkan untuk mengakui aset pajak tangguhan sesuai keseluruhan jumlah perbedaan sementara yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Saldo aset pajak tangguhan kemudian dievaluasi atau dinilai pada setiap akhir tanggal neraca, dengan didasarkan pada pengujian bahwa laba pada periode mendatang cukup untuk menutup saldo tersebut.

Sementara itu, kewajiban atau liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan sementara pada periode pengakuan pendapatan atau beban kena pajak yang terkait. Secara sederhana, kewajiban pajak tangguhan akan muncul ketika jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan di masa kini lebih kecil dari beban pajak sehingga kekurangannya harus dibayarkan di masa yang akan datang.

2.1.2 Beban Pajak Tangguhan

Berdasarkan PSAK No. 46, istilah beban pajak tangguhan digunakan untuk menjelaskan jumlah pajak penghasilan yang terutang atau terpulihkan di periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan sementara yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang belum dikompensasikan. Sedangkan menurut Phillips *et al.* (2003), beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul karena adanya perbedaan antara laba akuntansi atau laba yang diakui dalam laporan keuangan bagi pihak eksternal dengan laba fiskal atau laba yang digunakan dalam perhitungan pajak.

Suandy (2008) mengungkapkan bahwa ketika terdapat kemungkinan pembayaran pajak yang lebih besar di masa mendatang, maka sesuai dengan SAK, wajib pajak harus mengakuinya sebagai kewajiban atau liabilitas. Salah satu contohnya adalah ketika beban penyusutan aset tetap yang diakui secara komersial lebih rendah dari yang diakui secara fiskal karena perbedaan metode penyusutan aset. Selisih yang terjadi karena perbedaan tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban

pajak menurut komersial yang lebih besar pada masa yang akan datang. Rekonsiliasi fiskal berupa koreksi negatif diperlukan karena pendapatan menurut komersial lebih besar dari pendapatan fiskal dan pengeluaran berdasarkan akuntansi komersial lebih kecil daripada fiskalnya sehingga menyebabkan diakuinya kewajiban pajak tangguhan (Agoes dan Trisnawati, 2007).

Begitu pun sebaliknya, ketika terjadi rekonsiliasi yang bersifat positif maka, akan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan SAK, adanya kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil di masa mendatang dapat dianggap sebagai suatu aset. Contohnya adalah rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa mendatang berdasarkan ketentuan perpajakan dapat diakui sebagai aset pajak tangguhan. Karena sifatnya yang dapat digunakan sebagai manfaat perusahaan, aset pajak tangguhan harus dilakukan penilaian kembali setiap tahunnya. Jika terdapat kemungkinan di mana aset pajak tangguhan tidak mungkin direalisasikan, perusahaan harus melakukan penyisihan (*allowance*) terhadap realisasi aset pajak tangguhan (Purba dan Andreas, 2005).

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya jumlah beban atau manfaat pajak tangguhan yang disajikan dalam laporan laba rugi komersial perusahaan akan berpengaruh pada jumlah nominal laba setelah pajak. Apabila perusahaan secara komersial menghitung PPh yang terutang tanpa memperhitungkan koreksi fiskal, akan menyebabkan perbedaan dengan perhitungan PPh terutang menurut fiskus, yang secara otomatis juga akan mempengaruhi posisi neraca pada laporan keuangan

komersial (Muljono, 2006). Perusahaan harus melakukan jurnal penyesuaian atas jumlah perbedaan pajak terutang yang terjadi. Jurnal penyesuaian tersebut akan mempengaruhi besarnya rekening utang pajak dan laba setelah pajak yang diakui perusahaan dalam laporan laba rugi, sehingga posisi neraca perusahaan juga akan berubah.

Perusahaan mungkin saja membayar pajak yang lebih kecil pada saat ini, namun memiliki potensi utang pajak yang lebih besar di masa mendatang atau pun sebaliknya. Kemungkinan adanya dampak pajak pada posisi neraca perusahaan ini menyebabkan perlunya suatu perlakuan akuntansi atas akun pajak tangguhan. Di Indonesia, perlakuan akuntansi atas pajak tangguhan telah diatur dalam PSAK No. 46 mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan. Dalam PSAK No. 46, telah dijelaskan bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas pajak tangguhan tersebut.

a. Pengakuan

Dalam PSAK No. 46 paragraf 14 (IAI, 2014) dinyatakan bahwa semua perbedaan temporer atau sementara kena pajak diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan, kecuali apabila timbul perbedaan temporer kena pajak yang diakibatkan oleh:

1. *goodwill* yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal; atau

2. pada saat pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi yang bukan transaksi penggabungan usaha yang tidak mempengaruhi laba komersial dan laba fiskal.

Pengakuan akuntansi untuk kewajiban pajak tangguhan didasarkan pada kemungkinan adanya pembayaran pajak di masa mendatang yang lebih besar. Berdasarkan SAK akan diakui sebagai kewajiban, dengan jurnal sebagai berikut:

Beban Pajak Tangguhan	xxx
Kewajiban Pajak Tangguhan	xxx

Sedangkan untuk aset pajak tangguhan, seperti yang dijelaskan pada PSAK No. 46 paragraf 21, dapat diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang. Namun terdapat pengecualian untuk aset pajak tangguhan yang timbul dari:

1. *goodwill* negatif yang diakui sebagai pendapatan tangguhan sesuai dengan PSAK No. 22 mengenai Penggabungan Usaha; atau
2. pengakuan awal aktiva atau kewajiban pada transaksi yang bukan merupakan transaksi penggabungan usaha dan tidak mempengaruhi laba komersial atau pun laba fiskal.

Apabila terdapat kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa mendatang, maka akan diakui sebagai aset pajak lanjutan, dengan jurnal pengakuannya sebagai:

Aset Pajak Tangguhan	xxx
----------------------	-----

Pendapatan Pajak Tangguhan	xxx
----------------------------	-----

b. Pengukuran

Kewajiban dan aset pajak tangguhan harus diukur menggunakan tarif pajak yang akan diterapkan pada periode saat dilakukan realisasi aset atau pelunasan kewajiban. Hal ini sesuai dengan pernyataan pada PSAK No. 46 paragraf 30, yaitu diukur berdasarkan tarif pajak atau peraturan pajak yang berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal neraca.

Pada saat ini, tarif PPh yang berlaku tertuang dalam UU No. 36 Tahun 2008 yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2009 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh. Dalam Pasal 17 ayat (2b) UU No. 36 Tahun 2008 tersebut dijelaskan bahwa tarif PPh atas PKP (Penghasilan Kena Pajak) Wajib Pajak Badan sejak tahun 2010 dikenakan tarif tunggal sebesar 25%. Tarif pajak ini merupakan perubahan lanjutan dari tarif sebelumnya, yaitu sebesar 28% sesuai yang dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1b) UU No. 36 Tahun 2008.

c. Penyajian

Menurut PSAK No. 46 paragraf 45, penyajian aset pajak dan kewajiban pajak pada neraca harus disajikan secara terpisah dari aset dan kewajiban lainnya. Penyajian aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan juga harus dibedakan dari aset pajak kini dan kewajiban pajak kini, serta disajikan terpisah dari akun restitusi PPh dan utang PPh Pasal 29 (Agoes dan Trisnawati, 2007). Selain itu, menurut Purba dan Andreas (2005) penyajian akun aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan pada perusahaan dengan kombinasi bisnis tidak dapat saling mengurangkan antara saldo milik masing-masing induk dan anak perusahaan, sehingga harus disajikan dalam jumlah sesungguhnya.

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam pengakuannya, akun beban pajak tangguhan yang disajikan dalam laporan laba rugi komersial diperoleh dari hasil perhitungan koreksi fiskal baik berupa koreksi positif atau pun negatif. Contoh penyajian pajak tangguhan dalam laporan laba komersial dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penyajian Beban Pajak Tangguhan
dalam Laporan Laba Rugi Komersial

Laba Sebelum PPh	xxx
Beban (Manfaat) PPh:	
Pajak Kini	xxx
Pajak Tangguhan	<u>xxx</u> +/-
	(xxx)
Laba bersih	xxx

Sumber: Agoes dan Trisnawati (2007)

d. Pengungkapan

Dalam PSAK No. 46, pengungkapan beban pajak tangguhan diatur dalam paragraf 58 hingga paragraf 65 (IAI, 2014). Pada paragraf 57 dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan pajak tangguhan yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu:

1. Jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
2. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk sebagai berikut:

- a. Rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku.
 - b. Rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata (*average effective tax rate*) dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku.
3. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya.
4. Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) dari perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut, yang diakui sebagai aset pajak tangguhan pada neraca.
5. Penyajian untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap kelompok rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikutnya, yaitu:
 - a. Jumlah aset dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca untuk setiap periode penyajian.
 - b. Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi, apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aset atau kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca.

2.1.3 Perencanaan Pajak

Mangoting (1999) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai proses mengorganisasi atau memanajemen usaha wajib pajak atau kelompok untuk meminimalkan jumlah pajak terhutang baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sophar Lumbartoran (1996), manajemen pajak didefinisikan sebagai suatu cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi juga dengan menekan serendah mungkin jumlah pajak yang harus dibayar untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Terdapat berbagai cara untuk menekan jumlah kewajiban pajak tersebut, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) atau pun yang melanggar ketentuan perpajakan (*unlawful*). Cara-cara yang digunakan tersebut dapat digunakan dalam mengukur kepatuhan perpajakan wajib pajak, yaitu:

- a. *Tax saving*, yakni upaya wajib pajak untuk mengefisienkan beban pajak melalui alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih kecil. Salah satu contohnya adalah dengan pemberian natura kepada karyawan dalam bentuk bagian dari penghasilan sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya. Pembebanan sebagai biaya ini mengakibatkan kenaikan pada jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong, namun menurunkan jumlah PPh Badan dengan margin yang lebih besar.

- b. *Tax avoidance*, yakni upaya wajib pajak untuk mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang tidak termasuk sebagai objek pajak. Contohnya adalah perubahan tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura pada perusahaan yang mengalami kerugian. Melalui perubahan tersebut, perusahaan dapat menurunkan jumlah pajak PPh Pasal 21 karena pemberian natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.
- c. *Tax evasion*, yakni upaya wajib pajak untuk menekan beban pajak terhutang dengan cara menghindari pajak secara ilegal atau melanggar ketentuan perpajakan. Contoh bentuk pelanggaran tersebut adalah dengan cara tidak melaporkan sebagian hasil penjualan dan memperbesar jumlah biaya yang dibebankan dalam satu periode dengan cara fiktif.

Dengan melakukan manajemen pajak, wajib pajak dapat menerapkan ketentuan perpajakan untuk mengefisienkan beban pajaknya secara benar dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Terdapat beberapa tahap yang dapat dilakukan wajib pajak dalam melakukan manajemen pajak. Wajib pajak dapat melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), sebelum kemudian melaksanakan kewajiban pajak (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*).

Sebagai langkah awal dalam manajemen pajak, wajib pajak perlu melakukan perencanaan pajak dengan mengumpulkan data dan melakukan penelitian mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan melakukan perencanaan pajak,

wajib pajak dapat menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak yang mungkin dapat dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian dan celah-celah perpajakan (*loopholes*) yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan.

Perencanaan pajak pada dasarnya harus memiliki bukti-bukti pendukung yang memadai, dapat dipertanggungjawabkan secara bisnis atau komersial, dan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Jika dijelaskan secara sederhana, perencanaan pajak dimulai dengan memastikan apakah suatu transaksi merupakan objek pajak. Apabila transaksi tersebut merupakan objek pajak, maka wajib pajak perlu mengetahui apakah objek pajak tersebut dapat diefisiensikan dengan upaya mengurangi atau mengecualikan beban pajaknya. Kemudian wajib pajak juga perlu mengetahui apabila pembayaran pajak tersebut dapat ditunda atau ditangguhkan ke periode lainnya.

Dalam memulai perencanaan pajak, wajib pajak perlu memerhatikan aspek formal dan administratif serta aspek material dari perencanaan pajak itu sendiri. Aspek formal dan administratif dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
2. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan keuangan;
3. Memotong dan atau memungut pajak;
4. Membayar pajak; serta

5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Sedangkan aspek material yang perlu diperhatikan adalah penggunaan objek pajak sebagai basis penghitungan pajak. Dalam melakukan perencanaan pajak, wajib pajak harus melaporkan objek pajak secara benar dan lengkap sehingga dapat mengoptimalkan sumber dana yang dialokasikan untuk pembayaran pajak.

Hal penting lain yang perlu diperhatikan wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak adalah memahami atau menguasai ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menghindari pelanggaran yang dapat menyebabkan timbulnya sanksi perpajakan. Baik sanksi yang bersifat administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak, atau pun sanksi pidana berupa hukuman kurungan. Selain itu, dengan pemahaman atas ketentuan perpajakan yang baik, wajib pajak juga dapat menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penundaan yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan salah satunya adalah dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sampai dengan batas waktu yang diperkenankan, sehingga dapat menunda pembayaran pajaknya.

Dengan memahami celah pada ketentuan perpajakan, wajib pajak juga dapat mengoptimalkan kredit pajak yang mungkin diperkenankan. Pada dasarnya, kredit pajak merupakan pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipungut di muka dengan jumlah pajak yang terutang pada akhir tahun pajak sebelumnya.

2.1.4 Manajemen Laba

Secara umum, manajemen laba didefinisikan sebagai usaha pihak manajemen perusahaan untuk memaksimalkan atau meminimalkan laba sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai (Copeland, 1968). Menurut Schipper (1989), manajemen laba merupakan usaha untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Scott (2003) mendefinisikan manajemen laba berdasarkan dua perspektif, yaitu sebagai perilaku oportunistik para manajer dan dengan menggunakan perspektif *efficient earnings management*. Apabila ditinjau dari perilaku oportunistik yang mungkin muncul dari manajer perusahaan, manajemen laba adalah usaha untuk memaksimalkan kemampuannya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan biaya politis yang mungkin muncul antara manajer dan pemangku kepentingan. Sedangkan apabila dipandang melalui perspektif *efficient earnings management*, manajemen laba memberi manajer suatu kesempatan untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga yang mungkin akan mengganggu kepentingan pihak-pihak yang terdapat dalam kontrak. Dengan manajemen laba, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar perusahaan melalui keputusan-keputusan seperti keputusan untuk melakukan perataan laba perusahaan (*income smoothing*).

Manajemen laba sendiri dapat dijelaskan menggunakan Teori Akuntansi Positif yaitu melalui Teori Keagenan. Teori Keagenan berfokus pada hubungan antar pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan sumber daya untuk perusahaan dan bagaimana akuntansi dapat digunakan untuk memfungsikan hubungan tersebut (Deegan, 2006). Contohnya adalah hubungan antara pemilik perusahaan sebagai penyedia modal dan manajer sebagai pihak yang menggerakkan perusahaan. Hubungan dalam contoh tersebut dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu kontrak di mana satu orang atau lebih yang disebut sebagai *principal* menyewa orang lain atau *agent* untuk memberikan jasa demi kepentingan *principal* yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada *agent*. Ketika kekuasaan pembuatan keputusan didelegasikan, hal ini dapat mengakibatkan kemungkinan munculnya kerugian yang dikarenakan oleh masalah efisiensi dan biaya konsekuensi yang harus ditanggung *principal*. Setiap kerugian potensial dari laba yang diakibatkan oleh kinerja manajer yang berada di bawah performa yang seharusnya, dianggap sebagai biaya yang timbul dari delegasi pembuatan keputusan dalam hubungan keagenan yang disebut juga sebagai biaya keagenan.

Selain itu, manajemen laba juga dapat dijelaskan menggunakan *Positive Accounting Theory* (Teori Akuntansi Positif). Dalam Sumomba (2010) dijelaskan bahwa teori yang dipelopori oleh Watts dan Zimmerman (1986) memaparkan faktor-faktor ekonomi tertentu yang bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para

pembuat laporan keuangan. Hal ini dikarenakan akuntansi teori positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan yang dapat dijelaskan dalam tiga hipotesis, yaitu:

1. *The Bonus Plan Hypothesis*

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat digunakan untuk mempengaruhi besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan supaya manajer dapat memperoleh bonus yang maksimal setiap tahunnya, karena keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba yang dapat diperoleh perusahaan.

2. *The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis)*

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan di dalam perjanjian hutang (*debt covenant*). Sebagian besar perjanjian hutang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. Ketika perusahaan mulai terancam melanggar perjanjian hutang, maka manajer perusahaan akan berusaha untuk menghindari terjadinya perjanjian hutang tersebut dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Pelanggaran terhadap perjanjian hutang dapat mengakibatkan sanksi yang pada akhirnya akan membatasi tindakan manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan berusaha meningkatkan laba untuk menghindar atau setidaknya menunda pelanggaran perjanjian.

3. *The Political Cost Hypothesis*

Scott (2003) dalam Sumomba (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya.

Teori Akuntansi Positif didasarkan pada asumsi bahwa semua tindakan individu dikendalikan oleh kepentingan pribadi dan bahwa individu akan bertindak oportunistis selama tindakan tersebut akan menguntungkan mereka. Dengan berdasarkan pada asumsi ini, Teori Akuntansi Positif memprediksi bahwa setiap perusahaan akan berusaha mencari suatu mekanisme yang dapat menyejajarkan kepentingan manajer perusahaan sebagai *agent* dengan kepentingan pemilik perusahaan atau *stakeholder* sebagai *principal*.

2.1.4.1 Motivasi Manajemen Laba

Salah satu mekanisme yang dapat dilakukan manajer untuk dapat menyejajarkan kepentingan pihak manajemen dan pemilik perusahaan adalah dengan melakukan manajemen laba. Kemungkinan manajer untuk mendapatkan suatu penghargaan atau *reward* atas kinerja perusahaan yang umumnya dicerminkan oleh besaran laba perusahaan akan menjadi motivasi bagi manajer untuk melakukan

manajemen laba. Selain itu, terdapat beberapa hal lain yang dapat memotivasi manajer atau perusahaan secara umum untuk melakukan manajemen laba, seperti yang dikemukakan oleh Scott (2003), yaitu:

1. Kepentingan Bonus

Manajer sebagai pihak yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara oportunistik untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba perusahaan dan memperoleh bonus dari pemangku kepentingan atas kinerja laba yang baik.

2. Motivasi Politik

Manajemen laba digunakan sebagai cara menghindari tekanan publik dan peraturan-peraturan pemerintah yang lebih ketat dengan mengurangi jumlah laba dilaporkan.

3. Motivasi Perpajakan

Penghematan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi salah satu motivasi yang paling kuat bagi perusahaan untuk melakukan manajemen laba.

4. Pergantian Jabatan

Manajer atau pihak manajemen puncak yang mendekati masa pensiun akan cenderung meningkatkan laba perusahaan untuk meningkatkan bonus mereka. Selain itu, memaksimalkan laba perusahaan akan mengurangi kemungkinan pergantian manajemen meski masih dalam masa jabatan.

5. *Initial Public Offering* (IPO)

Perusahaan yang ingin *go public* pada umumnya akan berusaha menunjukkan jumlah laba yang positif melalui manajemen laba dengan harapan dapat menaikkan nilai pasar harga saham perusahaan.

6. Menghindari Asimetri Informasi

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus dikomunikasikan dengan pihak pemangku kepentingan atau investor, sehingga pelaporan mengenai laba perusahaan harus disajikan dengan baik untuk menghindari perselisihan dengan pemangku kepentingan yang mungkin terjadi karena informasi yang tidak relevan.

2.1.4.2 Teknik Manajemen Laba

Motivasi dan peluang yang ada mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba. Namun pada praktiknya, manajer harus dapat melakukan manajemen laba dengan cermat dan efisien sehingga tidak memunculkan permasalahan yang mungkin terjadi dari ketidaksesuaian informasi yang disampaikan. Terdapat beberapa teknik manajemen laba yang dapat dilakukan oleh manajemen, antara lain yang dijelaskan oleh Setiawati dan Na'im (2000), yaitu:

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi yaitu teknik manajemen laba untuk mempengaruhi laba melalui *judgement* terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi dan lain-lain.

2. Mengubah metode akuntansi perusahaan yang sesuai dengan kondisi perusahaan pada periode tersebut. Perubahan dalam metode akuntansi harus harus diungkapkan beserta alasan rasional dalam catatan atas laporan keuangan. Contohnya merubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.
3. Menggeser periode biaya atau pendapatan yang dalam SAK diharuskan menggunakan dasar akrual dalam pencatatan laporan keuangan (kecuali laporan arus kas), sehingga memberi kesempatan bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Contohnya dengan mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya, serta mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya.

Selain itu, terdapat empat jenis manajemen laba yang bisa dilakukan manajemen perusahaan sesuai yang dikemukakan oleh Scott (2003), yaitu:

a. Taking a Bath

Manajemen laba ini dilakukan ketika berada pada keadaan yang buruk, tidak menguntungkan, dan tidak bisa dihindari pada periode berjalan, dengan cara mengakui adanya biaya pada periode mendatang dan kerugian periode berjalan. Pengakuan biaya tersebut dapat mengakibatkan pelaporan laba yang lebih tinggi dari seharusnya pada periode selanjutnya.

b. Income Increasing

Manajemen laba dilakukan manajemen pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi agar tidak mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti kreditur dan pemerintah. Contoh kebijakan yang diambil berupa pembebanan biaya iklan, biaya riset dan pengembangan, serta biaya-biaya lain yang dapat mengurangi laba.

c. Income Maximization

Manajemen laba jenis ini biasanya terjadi pada perusahaan yang menentukan kompensasi manajemen berdasarkan laba yang dihasilkan, perusahaan yang sedang menghadapi kesepakatan kontrak hutang atau kredit, dan perusahaan yang akan melakukan *initial public offerings* (IPO).

d. Income Smoothing

Perataan laba ini merupakan bentuk manajemen laba yang paling banyak dilakukan karena manajemen dapat menaikkan dan menurunkan laba dengan mudah. Manajemen melakukan perataan laba untuk mengurangi fluktuasi laba sehingga perusahaan terlihat lebih stabil dan tidak beresiko tinggi. Kondisi perusahaan yang terlihat stabil akan mendorong investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan.

2.1.4.3 Pengukuran Manajemen Laba

Dalam mengungkapkan praktik manajemen laba yang mungkin dilakukan perusahaan terdapat berbagai proksi yang digunakan untuk mengevaluasi manajemen

laba dari berbagai upaya yang dilakukan oleh manajer. Terdapat beberapa model yang digunakan oleh peneliti sebagai proksi manajemen laba, yaitu:

1. *Unexpected Accrual* (Setiawati dan Na'im, 2000)

Penggunaan *unexpected accrual* (atau *discretionary accrual*) dipelopori oleh Healy (1985). Healy menggunakan total akrual perusahaan sebagai proksi *discretionary accrual*.

$$TA_{it} = \frac{\Delta CA_{it} - \Delta CI_{it} - \Delta Cash_{it} - \Delta STD_{it} - \Delta Dep_{it}}{\Delta A_{it-1}}$$

Keterangan :

TA_{it} : total akrual perusahaan i pada tahun t.

ΔCA_{it} : perubahan dalam aktiva lancar perusahaan i pada periode t.

ΔCI_{it} : perubahan dalam hutang lancar perusahaan i pada periode t.

$\Delta CASH_{it}$: perubahan dalam kas dan ekuivalen kas hutang lancar perusahaan pada periode ke-t.

ΔSTD_{it} : perubahan dalam hutang jangka panjang termasuk dalam hutang lancar perusahaan i pada periode ke t-1.

A_{it-1} : total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1.

i : 1.....n perusahaan.

t : 1.....t tahun perusahaan.

2. *Specific Accrual* (Setiawati dan Na'im, 2000)

Penelitian McNichols dan Wilson (1998) serta Ahmed *et al.* (2000) menggunakan akrual tertentu untuk melihat bagaimana manajer mempengaruhi laba. Dalam dua penelitian tersebut, cadangan piutang tak tertagih atau *provision for bad debt* digunakan sebagai proksi manajemen laba.

3. Aktivitas Operasional

Beberapa penelitian melihat manajemen laba dari aktivitas operasional manajer, seperti bagaimana manajer menggeser pembelian persediaan pada tahun yang akan datang untuk dimasukkan ke dalam pembelian tahun ini (Frankel *et al.*, 1994). Atau bagaimana manajer memilih waktu penjualan aktiva perusahaan atau *long lived assets and investement* (Bartov, 1993). Collins *et al.* (1997) juga menggunakan penundaan pengakuan pendapatan dan percepatan pengakuan biaya sebagai proksi manajemen laba.

4. Pendekatan Distribusi Laba (Phillips *et al.*, 2003)

Pendekatan distribusi laba mengidentifikasi batas pelaporan laba (*earnings thresholds*) dan menemukan bahwa perusahaan yang berada di bawah *earnings thresholds* akan berusaha melewati batas tersebut dengan melakukan manajemen laba. Para manajer melakukan manajemen laba dengan menggunakan pendekatan distribusi laba, karena manajemen perusahaan menyadari bahwa pihak eksternal, seperti investor, kreditur, dan *supplier* akan menggunakan batas pelaporan laba dalam menilai kinerja mereka (Degeorge *et al.*, 1999).

Burstagler dan Dichev (1997) dalam Phillips *et al.* (2003) menyatakan bahwa terdapat dua macam *earnings thresholds*, yaitu:

- a. Titik pelaporan laba nol, yang menunjukkan usaha manajemen laba untuk menghindari pelaporan kerugian.
- b. Titik perubahan laba nol, yang menunjukkan usaha manajemen laba untuk menghindari penurunan laba.

Menurut Phillips *et al.* (2003), rumus untuk mengetahui manajemen laba melalui pendekatan distribusi laba, yaitu:

$$SEC = \frac{E_{it} - E_{it-1}}{MVE_{t-1}}$$

Keterangan:

SEC : *Scaled Earnings Changes* (perubahan laba).

E_{it} : laba perusahaan i pada tahun t.

E_{it-1} : laba perusahaan i pada tahun t-1.

MVE_{it-1} : *Market value of equity* (harga saham) perusahaan i pada tahun t-1.

Berdasarkan empat model pengukuran manajemen laba yang telah dijelaskan tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan model pengukuran manajemen laba yang keempat yaitu pendekatan distribusi laba.

Penggunaan metode didasarkan pada penelitian Phillips *et al.* (2003), Setiowati (2007), dan Sumomba (2010).

2.1.5 Peran Perencanaan Pajak dalam Praktik Manajemen Laba

Secara teoretis, peran perencanaan pajak dalam praktik manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori keagenan dan teori akuntansi positif. Dalam pembayaran pajak perusahaan, manajemen perusahaan sebagai pihak *agent* akan berusaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya karena hal ini akan berpengaruh pada kemampuan ekonomis perusahaan. Namun dilain sisi, pemerintah sebagai pihak *principal* memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk penyelenggaraan negara. Perbedaan kepentingan yang mungkin terjadi antara kedua belah pihak inilah yang memotivasi perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah.

Dalam teori akuntansi positif, yaitu hipotesis biaya politik (*The Politycal Cost Hypothesis*) juga dijelaskan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa dengan menurunkan laba yang dilaporkan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung (Scott, 2003). Biaya politik yang dimaksud dalam teori tersebut mencakup seluruh biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, salah satunya adalah beban pajak.

Selain mengenai keuntungan fiskal yang diperoleh perusahaan, perencanaan pajak juga menguntungkan perusahaan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan atau pun pengajuan pinjaman. Pada perusahaan yang telah *go public*, penggunaan informasi kinerja yang dilaporkan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan sangat mempengaruhi keputusan investor dalam pembelian saham. Jumlah laba bersih perusahaan yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan dapat dengan sangat mudah dipengaruhi oleh pajak sebagai unsur pengurang laba yang tersedia. Begitu juga kreditur atau pihak-pihak eksternal lain yang berkaitan dengan penyediaan modal perusahaan.

2.1.6 Hubungan Beban Pajak Tangguhan dengan Manajemen Laba

Kebebasan yang diberikan SAK kepada perusahaan dalam memilih metode akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan komersial dan ketentuan perpajakan yang hanya memperbolehkan penggunaan basis kas dalam penyusunan laporan keuangan fiskal menyebabkan munculnya perbedaan antara laba fiskal dan laba komersial. Secara tidak langsung koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal dapat digunakan dalam mendeteksi adanya praktik manajemen laba dalam perusahaan. Hal ini didukung oleh pernyataan Penman (2001) dalam Wijayanti (2006) bahwa perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat digunakan sebagai diagnosa untuk mendeteksi adanya manipulasi pada biaya suatu perusahaan.

Penjelasan lain yang mendukung pernyataan bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba adalah dengan melihat koreksi fiskal yang berupa koreksi negatif. Koreksi negatif merupakan keadaan di mana jumlah pendapatan menurut fiskal perusahaan lebih kecil dari akuntansi komersial dan pengeluaran menurut fiskal perusahaan lebih besar dari akuntansi komersial. Hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kenaikan kewajiban pajak tangguhan pada neraca periode berjalan dan beban pajak tangguhan pada laporan laba rugi periode selanjutnya.

Kenaikan kewajiban pajak tangguhan akan mengikuti pengakuan pendapatan yang lebih awal atau penundaan biaya untuk tujuan pelaporan keuangan komersial oleh perusahaan pada periode tersebut. Dengan adanya tindakan perusahaan untuk mengakui pendapatan lebih awal dan menunda pengakuan biaya dapat mengindikasikan praktik manajemen laba pada laporan keuangan komersial perusahaan. Semakin tinggi praktik manajemen laba suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kewajiban pajak tangguhan yang diakui perusahaan sebagai beban pajak tangguhnya (Phillips *et al.*, 2003).

2.2 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan sebagai salah satu instrumen yang digunakan pihak-pihak pemangku kepentingan dalam menilai kinerja suatu perusahaan, merupakan salah

satu subyek rekayasa oleh manajemen demi memenuhi kepentingannya. Usaha dalam mempengaruhi informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan oleh manajer dikenal sebagai manajemen laba. Terdapat berbagai metode dalam melakukan manajemen laba, salah satunya yang berkaitan dengan perencanaan pajak dan pengakuan beban pajak tangguhan sebagai salah satu faktor pengurang laba dalam laporan laba rugi komersial.

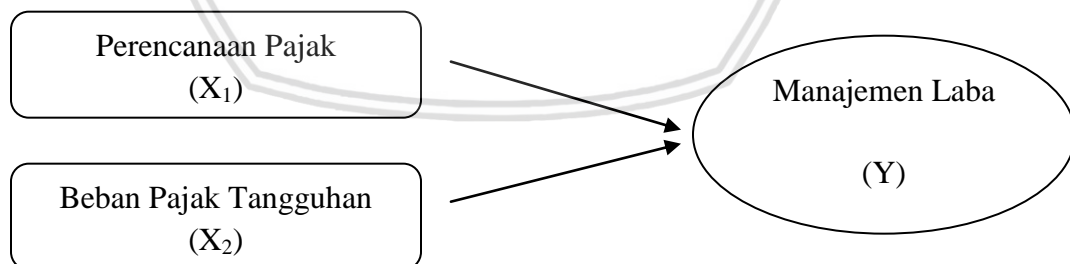
Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dengan seefektif mungkin tidak hanya berhubungan dengan jumlah beban pajak yang harus dibayar perusahaan, namun juga dengan besaran laba yang dapat dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan. Mengingat hal tersebut, terdapat suatu indikasi manajemen perusahaan melakukan manajemen laba dalam proses perencanaan pajak.

Selain itu, pendekatan lain yang dapat digunakan dalam mendeteksi praktik manajemen laba perusahaan yaitu dengan beban pajak tangguhan. Menurut Plesko (2002) dalam Phillips *et al.* (2003), semakin besar perbedaan antara laba fiskal dan laba komersial menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen. Beban pajak tangguhan dapat merefleksikan besarnya diskresi manajemen yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Beberapa diantaranya adalah penelitian Jackson dan Holland (2002) mengenai hubungan beban

pajak tangguhan dan manajemen laba pada 58 perusahaan di Inggris, penelitian Phillips *et al.* (2003) mengenai pengaruh beban pajak tangguhan dan model akrual terhadap manajemen laba pada perusahaan di Amerika Serikat tahun 1994-2004, Sumomba (2010) mengenai pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 hingga 2010, serta penelitian Astutik (2016) dengan variabel yang sama namun dilakukan pada perusahaan di bidang *food and beverages* selama periode tahun 2012 hingga 2014. Penelitian sejenis yang menggunakan perusahaan non-manufaktur sebagai obyek adalah penelitian Aditama (2014) mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan non-manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009 hingga 2012.

Berdasarkan beberapa teori serta hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.2.1 Hubungan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Hubungan antara perencanaan pajak dan manajemen laba secara teori dapat dijelaskan dengan teori keagenan dan teori akuntansi positif. Dalam teori keagenan dijelaskan mengenai masalah keagenan yang timbul karena perbedaan kepentingan dan tujuan antara pihak *principal* dan *agent*, serta resiko yang harus dihadapi karena adanya perbedaan tersebut dan akan memunculkan biaya-biaya tertentu untuk mengurangnya (biaya keagenan). Salah satu resiko yang dapat timbul dalam hubungan keagenan antara pemangku kepentingan atau pun pemerintah sebagai pihak *principal* dan manajemen perusahaan sebagai *agent* adalah perbedaan informasi atau *information assymetry* yang dapat disebabkan oleh penyajian dan penggunaan informasi dalam laporan keuangan perusahaan. Dalam pelaporan keuangan perusahaan, manajer memiliki kesempatan untuk melakukan manajemen laba guna meningkatkan kinerja perusahaan utamanya mengenai laba bersih perusahaan sebagai salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan.

Selain itu, berdasarkan teori akuntansi positif, yaitu hipotesis biaya politik (*The Politycal Cost Hypothesis*) juga dijelaskan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa dengan menurunkan laba yang dilaporkan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung (Scott, 2003). Biaya politik yang dimaksud dalam teori tersebut mencakup

seluruh biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, salah satunya adalah beban pajak. Manajer akan berusaha untuk menekan jumlah beban pajak yang harus ditanggung perusahaan seminimal mungkin mengingat beban pajak merupakan salah satu pengurang laba bersih perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan akan melakukan manajemen laba dengan melaksanakan perencanaan pajak dengan seefektif mungkin.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba telah diteliti oleh Aditama (2013). Penelitian dilakukan pada perusahaan non-manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009 hingga 2012. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada obyek yang diteliti. Hal ini berbeda dengan teori yang ada sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk menambah bukti empiris mengenai pengaruh tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.2.2.2 Hubungan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Beban pajak tangguhan adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam mendeteksi praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Perbedaan yang timbul dalam penyusunan laporan keuangan yang ditujukan untuk kepentingan komersial perusahaan berdasarkan SAK dan laporan keuangan fiskal yang digunakan

dalam penentuan jumlah beban pajak perusahaan dapat menyediakan informasi tambahan bagi pengguna laporan keuangan mengenai kualitas *current earnings* (Phillips *et al.*, 2003). Peraturan perpajakan cenderung lebih membatasi dalam penggunaan diskresi untuk menghitung penghasilan kena pajak, karena hal tersebut, selisih laba komersial dan laba fiskal dapat memberikan informasi mengenai diskresi manajemen dalam proses akrual perusahaan (Hanlon, 2005).

Semakin besar perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen. Menurut Plesko (2002) dalam Phillips *et al.* (2003), besarnya diskresi manajemen tersebut akan terefleksi dalam beban pajak tangguhan yang diakui perusahaan dan dapat digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba pada perencanaan pajak perusahaan tersebut.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan beban pajak tangguhan dalam mendeteksi manajemen laba. Beberapa contohnya yaitu penelitian Jackson dan Holland (2002) mengenai hubungan beban pajak tangguhan dan manajemen laba pada 58 perusahaan di Inggris dan penelitian Phillips *et al.* (2003) mengenai pengaruh beban pajak tangguhan dan model akrual terhadap manajemen laba pada perusahaan di Amerika Serikat tahun 1994-2004.

Penelitian terkait juga dilakukan pada perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu penelitian Sumomba (2010) mengenai pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 hingga 2010. Penelitian lainnya yaitu penelitian Astutik (2016) dengan variabel yang sama namun dilakukan pada perusahaan di bidang *food and beverages* selama periode tahun 2012 hingga 2014.

Berdasarkan teori yang terkait dan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi empiris dengan metode kuantitatif yang dilakukan untuk memahami suatu fenomena yang menjadi perhatian dan melengkapi pengetahuan peneliti dengan pengembangan teori melalui pengujian hipotesis. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian dengan menggunakan populasi atau sampel tertentu, dengan menggunakan statistik dalam menganalisis data (Sugiyono, 2015).

Penelitian ini dilakukan menggunakan data-data sekunder yang telah tersedia sebelumnya. Menurut Indriantoro (2002), data sekunder merupakan sumber data yang diterima peneliti secara tidak langsung atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Beberapa contoh dari data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, sumber internet, dan sumber-sumber yang telah dikumpulkan pihak tertentu lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2015), populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek atau obyek dengan kualitas atau karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan disimpulkan dalam sebuah penelitian. Secara sederhana, populasi adalah keseluruhan subyek atau obyek penelitian yang digunakan oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan non-manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2014 hingga tahun 2016 sebagai populasinya. Perusahaan sektor non-manufaktur digunakan berdasarkan hasil penelitian Setiowati (2007) yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan pada sektor tersebut memiliki probabilitas yang lebih tinggi di dalam praktik manajemen laba.

Berdasarkan populasi tersebut, peneliti mengambil beberapa sampel yang akan diteliti lebih lanjut. Sampel merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya akan diselidiki dengan jumlah yang lebih kecil dari populasi, namun dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan non-manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah pengambilan sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh peneliti (Hartono, 2016).

Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang digunakan adalah perusahaan non-manufaktur kecuali perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang terdaftar secara aktif di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2014 hingga 2016. Perusahaan-perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya tidak digunakan sebagai sampel di dalam penelitian ini untuk menghindari industri atau peraturan khusus yang mungkin dapat mempengaruhi penggunaan *discretionary accruals* (Setiowati, 2007).
- b. Perusahaan memiliki laporan keuangan yang telah diaudit per 31 Desember selama periode tahun 2014 hingga tahun 2016 dan mempublikasikan laporan keuangan tersebut.
- c. Saham perusahaan non-manufaktur tersebut dikelompokkan sebagai saham perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan, sesuai kriteria yang dijelaskan pada surat edaran PT Bursa Efek Jakarta No. SE-03/BEJ II-I/1994 yaitu saham yang aktif jika diperdagangkan sebanyak tujuh puluh lima kali dalam waktu tiga bulan.
- d. Perusahaan tidak di-*delisting* selama periode tahun 2014 hingga tahun 2016. Baik *delisting* yang bersifat *voluntary* atau atas permintaan perusahaan, atau pun *delisting* yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia karena tidak dapat menunjukkan adanya pemulihan saham yang berarti di

pasar atau saham di-*suspense* dari Pasar Reguler dan Pasar Tunai sehingga hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi selama 24 bulan terakhir.

- e. Perusahaan melaporkan akun beban pajak tangguhan selama periode tahun 2014 hingga tahun 2016.
- f. Perusahaan tidak melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi, serta perubahan kelompok usaha yang akan menyebabkan perbedaan dalam penyajian laporan keuangan sehingga mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan perusahaan.

3.3 Data Penelitian

3.3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak ketiga berupa informasi tulisan dan bahan dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta buku-buku referensi lainnya (Indriantoro, 2002). Data sekunder yang digunakan berupa data-data kuantitatif yang dapat diketahui dari laporan keuangan yang telah diaudit dan dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan non-manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2014 hingga tahun 2016. Data penelitian dapat diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan atau kajian terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan obyek pembahasan (Nazir, 1998). Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan dan buku-buku atau artikel jurnal pendukung. Studi kepustakaan merupakan langkah selanjutnya untuk memperdalam pemahaman atas obyek yang ingin diteliti dengan memahami teori-teori yang mendasari masalah dan bidang terkait.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel adalah berbagai aspek yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2014). Nilai sendiri dapat berbeda untuk obyek atau orang yang sama dengan waktu yang berbeda, atau pun pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis variabel yang digunakan yaitu variabel independen dan variabel dependen.

3.4.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau negatif (Sekaran, 2014). Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel independen yang ingin diuji, yaitu:

1. Perencanaan Pajak (X_1)

Perencanaan pajak merupakan usaha atau langkah yang ditempuh wajib pajak untuk meminimumkan jumlah beban pajak pada periode berjalan atau di masa mendatang secara legal dengan menggunakan celah-celah (*loopholes*) dalam ketentuan perpajakan. Dalam penelitian ini, perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak), yang digunakan untuk menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan. Menurut Wild *et al.* (2005) dalam Ferry (2013), rumus *tax retention rate* adalah:

$$TRR_{it} = \frac{Net\ Income_{it}}{Pretax\ Income\ (EBIT_{it})}$$

Keterangan:

TRR_{it} : *Tax Retention Rate* (tingkat retensi pajak) perusahaan i pada tahun t .

$Net\ Income_{it}$: Laba bersih perusahaan i pada tahun t .

$Pretax\ Income\ (EBIT_{it})$: Laba sebelum pajak perusahaan i tahun t .

2. Beban Pajak Tangguhan (X_2)

Beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba komersial atau laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal dan

laba fiskal laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Beban pajak tangguhan diukur dengan membagi jumlah pajak tangguhan dan dengan jumlah keseluruhan aset perusahaan pada akhir tahun. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung beban pajak tangguhan adalah:

$$BPT = \frac{\text{Pajak Tangguhan}_t}{\text{Total Aktiva}_{t-1}}$$

Keterangan:

Pajak Tangguhan : Beban Pajak Tangguhan selama periode t .

Total Aktiva _{$t-1$} : Total aktiva perusahaan pada periode $t-1$.

3.4.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Tujuan peneliti adalah memahami dan membuat variabel dependen, menjelaskan atau memprediksi variabilitasnya (Sekaran, 2014). Dengan kata lain, variabel dependen merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam pengujian.

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang menjadi perhatian adalah manajemen laba. Manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan pendekatan distribusi laba yang dikemukakan oleh Phillips *et al.* (2003). Manajemen laba dapat dikatakan sebagai variabel *dummy* karena manajemen laba merupakan variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif dan hanya memiliki dua nilai yaitu 1 dan 0 (Cooper dan Schindler, 2006).

Untuk mengukur variabel dependen ini, sampel dibagi ke dalam dua kategori yakni kategori dengan kode 1 jika perusahaan berada dalam *range small profit firms* pada *range* 0 sampai dengan ≥ 1 , dan kode 0 jika perusahaan berada dalam *range small loss firm* pada *range* -0,09 sampai dengan 0. Untuk menentukan perusahaan berada dalam *range small profit firms* atau *small loss firms* dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Scaled\ Earnings\ Changes_{it} = \frac{Net\ Income_{it} - Net\ Income_{it-1}}{MVE_{t-1}}$$

Keterangan:

ΔE : perubahan laba.

E_{it} : laba perusahaan *i* pada tahun *t*.

E_{it-1} : laba perusahaan *i* pada tahun *t-1*.

MVE_{it-1} : *Market value of equity* perusahaan *i* pada tahun *t-1*.

3.5 Teknik Analisis Data

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, data-data tersebut dianalisis lebih lanjut menggunakan statistik deskriptif dan regresi logistik. Dalam ilmu statistik, analisis deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dengan apa adanya tanpa menyimpulkan hasil olahan data secara umum (Sugiyono, 2015). Dalam

penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk mempermudah interpretasi data yang telah diperoleh dengan mendeskripsikan data yang bersifat kuantitatif menjadi kualitatif.

Selain itu, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi logistik karena variabel bebas dalam penelitian ini merupakan kombinasi antara metrik dan nominal atau non-metrik, serta variabel terikat merupakan variabel *dummy*. Menurut Donald Cooper dan Pamela Schindler (2006), variabel *dummy* atau variabel boneka merupakan variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif dan hanya memiliki dua nilai yaitu 1 dan 0 yang dilambangkan dengan simbol D. Pada prinsipnya, regresi logistik bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan memperkirakan besarnya kemungkinan suatu kejadian tertentu di dalam suatu populasi.

Regresi logistik digunakan untuk menguji apakah variabel beban pajak tangguhan berpengaruh dalam mendeteksi manajemen laba. Model regresi logistik yang digunakan dalam pengujian adalah sebagai berikut:

$$\ln \frac{EM}{1-EM} = \alpha + \beta_1 TRR_{it} + \beta_2 DTE_{it} + \varepsilon$$

Keterangan:

$\ln \frac{EM}{1-EM}$: variabel *dummy* atau manajemen laba

Nilai 1 untuk perusahaan yang berada dalam *range small profit firm* dan nilai 0 untuk perusahaan yang berada dalam *range small loss firm*.

TRR_{it} : *Tax Retention Rate* (Tingkat Retensi Pajak) perusahaan i pada tahun t .

DTE_{it} : *Deffered Tax Expense* (Beban Pajak Tangguhan) perusahaan i pada tahun t dibagi dengan *Total Assets* pada akhir tahun t .

ε : *error term*



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Pemilihan Sampel

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dilakukan pemilihan sampel dari perusahaan-perusahaan non-manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013 hingga tahun 2016 dengan periode pengamatan terakhir yaitu tahun 2016 sebagai acuan. Hasil pemilihan sampel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Proses Pemilihan Sampel

Keterangan	2016
Total perusahaan non-manufaktur kecuali perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang terdaftar dalam BEI	226
Perusahaan yang mengalami <i>delisting</i> maupun sahamnya tidak aktif	(109)
Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit per 31 Desember selama periode pengamatan	(29)
Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data yaitu perusahaan yang tidak melaporkan beban pajak tangguhan	(14)
Perusahaan yang melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi, dan perubahan kelompok usaha	(5)
Total	69

Sumber: Pemilihan Sampel Peneliti

Tabel 4.2
Daftar Perusahaan yang Menjadi Sampel

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan
1.	APLN	PT Agung Podomoro Land Tbk.
2.	ASRI	PT Alam Sutera Realty Tbk.
3.	BCIP	PT Bumi Citra Permai Tbk.
4.	BIPP	PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk.
5.	DILD	PT Intiland Development Tbk.
6.	LPCK	PT Lippo Cikarang Tbk.
7.	LPKR	PT Lippo Karawaci Tbk.
8.	PWON	PT Pakuwon Jati Tbk.
9.	ACST	PT Acset Indonusa Tbk.
10.	ADHI	PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
11.	SSIA	PT Surya Semesta Internusa Tbk.
12.	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
13.	RAJA	PT Rukun Raharja Tbk.
14.	CMNP	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.
15.	META	PT Nusantara Infrastructure Tbk
16.	EXCL	PT XL Axiata Tbk.
17.	ISAT	PT Indosat Tbk.
18.	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
19.	GIAA	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
20.	TAXI	PT Express Transindo Utama Tbk.
21.	TMAS	PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk.
22.	TRAM	PT Trada Maritime Tbk.
23.	WEHA	PT Weha Transportasi Indonesia Tbk.
24.	AKRA	PT AKR Corporindo Tbk.
25.	INTA	PT Intraco Penta Tbk.

26.	KOBX	PT Kobexindo Tractors Tbk.
27.	MPMX	PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
28.	TURI	PT Tunas Ridean Tbk.
29.	UNTR	PT United Tractors Tbk.
30.	WICO	PT Wicaksana Overseas International Tbk.
31.	ACES	PT Ace Hardware Indonesia Tbk.
32.	CSAP	PT Catur Sentosa Adiprana Tbk.
33.	LPPF	PT Matahari Department Store Tbk.
34.	MAPI	PT Mitra Adiperkasa Tbk.
35.	MPPA	PT Matahari Putra Prima Tbk.
36.	RALS	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk.
37.	RIMO	PT Rimo International Lestari Tbk.
38.	TELE	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.
39.	MAMI	PT Mas Murni Indonesia Tbk.
40.	JTPE	PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk.
41.	MNCN	PT Media Nusantara Citra Tbk.
42.	TMPO	PT Tempo Inti Media Tbk.
43.	SAME	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk.
44.	SILO	PT Siloam International Hospitals Tbk.
45.	LMAS	PT Limas Indonesia Makmur Tbk.
46.	BHIT	PT MNC Investama Tbk.
47.	BMTR	PT Global Mediacom Tbk.
48.	MLPL	PT Multipolar Tbk.
49.	MTLA	PT Metropolitan Land Tbk.
50.	RODA	PT Pikko Land Development Tbk.
51.	SMDM	PT Suryamas Dutamakmur Tbk.
52.	ASSA	PT Adi Sarana Armada Tbk.

53.	NELY	PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk.
54.	LTLS	PT Lautan Luas Tbk.
55.	OKAS	PT Ancora Indonesia Resources Tbk.
56.	SDPC	PT Millenium Pharmacon International Tbk.
57.	AMRT	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
58.	CENT	PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.
59.	HERO	PT Hero Supermarket Tbk.
60.	RANC	PT Supra Boga Lestari Tbk.
61.	HOME	PT Hotel Mandarine Regency Tbk.
62.	ICON	PT Island Concpets Indonesia Tbk.
63.	PGLI	PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk.
64.	SHID	PT Hotel Sahid Jaya International Tbk.
65.	DNET	PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.
66.	MLPT	PT Multipolar Technology Tbk.
67.	MTDL	PT Metrodata Electronics Tbk.
68.	BNBR	PT Bakrie & Brothers Tbk.
69.	DYAN	PT Dyandra Media International Tbk.

Sumber: Hasil Pengolahan Data

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak diukur menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak) untuk menganalisis ukuran efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan (Wild *et al.*, 2005). Hasil dari pengukuran tersebut diolah menggunakan statistik deskriptif yang disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Hasil Statistik Deskriptif *Tax Retention Rate* (TRR)

Perhitungan Statistik	Tax Retention Rate Tahun ...			2014 – 2016
	2014	2015	2016	
MIN	-5,97758226	-1,04287604	0,08985321	-5,97758226
MAX	2,34148376	8,16651062	4,31215547	8,16651062
MEAN	0,6649666	1,02873298	0,93187326	0,87519095
STANDAR DEVIASI	0,88367621	1,06374851	0,60421861	0,23154924

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa pada tahun 2014, tingkat retensi pajak terendah terdapat pada laba yang dilaporkan PT Intraco Penta Tbk. (INTA) sebesar -5,97758226. Sedangkan pada tahun 2015 terdapat pada PT MNC Investama Tbk. (BHIT) sebesar -1,04287604 dan pada tahun 2016 diperoleh oleh laba dari PT Wicaksana Overseas International Tbk. (WICO) sebesar 0,08985321. Tingkat retensi pajak tertinggi pada tahun 2014 sebesar 2,34148376 terdapat pada PT Hero Supermarket Tbk. (HERO). Sedangkan untuk tahun 2015 sebesar 8,16651062 dan tahun 2016 sebesar 4,31215547 secara berturut-turut diperoleh dari laba yang dilaporkan PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. (SAME).

Melalui hasil statistik deskriptif, juga diketahui besarnya nilai *mean* variabel perencanaan pajak yaitu 0,87519095 dan standar deviasi sebesar 0,23154924. Nilai *mean* variabel perencanaan pajak tersebut menunjukkan bahwa rata-rata laba bersih yang dilaporkan perusahaan non-manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

pada tahun 2014-2016 lebih tinggi 87,5% dibandingkan dengan rata-rata laba sebelum pajak yang dilaporkan selama periode 2014-2016.

4.2.2 Beban Pajak Tangguhan

Beban Pajak Tangguhan diperoleh dengan membagi jumlah beban pajak tangguhan dengan total aset perusahaan pada akhir periode. Hasil statistik deskriptif dari perhitungan beban pajak tangguhan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4
Hasil Statistik Deskriptif Beban Pajak Tangguhan

Perhitungan Statistik	Beban Pajak Tangguhan Tahun ...		
	2014	2015	2016
MIN	-0,01654355	-0,02555768	-0,01973954
MAX	0,03327115	0,01900246	0,01796348
MEAN	0,00168166	-0,00141257	0,0004832
STANDAR DEVIASI	0,005688776	0,006794036	0,005911318

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 4.4, dapat dilihat bahwa nilai beban pajak tangguhan pada tahun 2014, terendah berada pada PT United Tractors Tbk. (UNTR) sebesar -0,01654355. Sedangkan pada tahun 2015 berada pada PT Weha Transportation Indonesia Tbk. (WEHA) sebesar -0,02555768 dan pada tahun 2016 berada pada PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk. (TMAS) dengan besaran -0,01973954. Untuk nilai tertinggi beban pajak tangguhan pada tahun 2014 tercatat pada PT Garuda Indonesia Airlines Tbk. (GIAA) sebesar 0,03327115. Sedangkan,

nilai tertinggi pada tahun 2015 sebesar 0,01900246 berada pada PT Ancora Indonesia Resources Tbk. (OKAS) dan pada tahun 2016 sebesar 0,01796348 pada PT Tempo Inti Media Tbk. (TMPO).

4.2.3 Manajemen Laba

Variabel manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan pendekatan distribusi laba (Phillips *et al.*, 2003). Variabel ini juga dapat dikatakan sebagai variabel *dummy*, di mana dalam penghitungannya dibagi dalam dua kategori batas pelaporan laba (*earnings thresholds*) yaitu *small profit firms* dan *small loss firms*. Kategori perusahaan yang termasuk dalam *small profit firms* memiliki nilai lebih dari 0 atau berada pada range 0 sampai dengan 0,09 dan diidentifikasi menggunakan nilai *dummy* 1. Sedangkan perusahaan akan dikategorikan sebagai *small loss firms*, apabila berada pada range -0,09 sampai dengan 0 dan diidentifikasi dengan nilai *dummy* 0. Hasil statistik deskriptif dari variabel ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5
Hasil Statistik Deskriptif *Scaled Earnings Changes*

Variabel	N	MIN	MAX	MEAN	STANDAR DEVIASI
Manajemen Laba	207	-1,22279641	1,63660417	0,0046556	0,29124641

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil statistik deskriptif di atas, diketahui nilai minimum sebesar -1,22, nilai maksimum sebesar 1,64, nilai *mean* sebesar 0,0047, dan nilai standar

deviasi sebesar 0,29. Nilai *mean* variabel manajemen laba yang memiliki nilai positif tersebut menunjukkan usaha manajemen laba yang dilakukan perusahaan untuk menghindari penurunan laba. Hal ini didasarkan pada pengukuran manajemen laba yang dikemukakan oleh Phillips *et al.* (2003), yang menggunakan titik perubahan nol untuk mengetahui indikasi praktik manajemen laba yang dilakukan manajemen dengan cara membandingkan perusahaan yang memiliki laba bernilai negatif.

Philips *et al.* (2003) mengungkapkan bahwa peningkatan beban pajak tangguhan yang ada dalam elemen perencanaan pajak, meningkatkan peluang pengelolaan laba untuk menghindari penurunan laba. Teori tersebut mendukung penggunaan variabel perencanaan pajak dalam memprediksi manajemen laba.

4.3 Statistik Deskriptif

Perusahaan-perusahaan yang telah dikategorikan sesuai dengan teori yang dikemukakan Phillips *et al.* (2003), diolah menggunakan statistik deskriptif dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.6
Hasil Statistik Deskriptif *Small Profit Firms*

Variabel	N	MIN	MAX	MEAN	STANDAR DEVIASI
BPT (X₁)	110	-0,01458857	0,01765829	0,00039715	0,00462112
TRR (X₂)	110	-5,97758226	8,16651063	0,8830006	1,05369825

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 4.7
Hasil Statistik Deskriptif *Small Loss Firms*

Variabel	N	MIN	MAX	MEAN	STANDAR DEVIASI
BPT (X₁)	97	-0,02555768	0,03327115	0,00008476	0,00771822
TRR (X₂)	97	-1,04287604	4,31215547	0,86633464	0,63520518

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel 4.6 dan 4.7, dapat diketahui bahwa terdapat 110 perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai *small profit firms* dan 97 perusahaan yang dikategorikan sebagai *small loss profit*. Angka tersebut diperoleh dari 69 sampel penelitian dari perusahaan-perusahaan non-manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2016 sehingga jumlah sampel yang diobservasi menjadi 207.

Hasil statistik deskriptif untuk kategori *small profit firms* menunjukkan bahwa variabel Beban Pajak Tangguhan (X₁) memiliki *mean* sebesar 0,00039715 atau sebesar 0,4% dari total aset akhir tahun yang dilaporkan selama periode 2014-2016 dengan standar deviasi sebesar 0,00462112. Sedangkan untuk variabel perencanaan pajak (X₂), nilai rata-rata atau *mean* yang diperoleh sebesar 0,8830006 dengan standar deviasi sebesar 1,05369825.

Selanjutnya untuk kategori *small loss firms*, dijelaskan pada tabel 4.7 untuk variabel Beban Pajak Tangguhan diperoleh *mean* sebesar 0,00008476 atau kurang dari 0,1% total aset yang dilaporkan dengan standar deviasi sebesar 0,00771822.

Serta untuk variabel perencanaan pajak, diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,86633464 atau rata-rata perencanaan pajak perusahaan sebesar 14% dari laba sebelum pajak perusahaan dengan standar deviasi sebesar 0,63520518.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*

Kelayakan model regresi logistik dapat diuji menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Ketika nilai hasil statistik dari pengujian ini lebih besar dari 0,05 maka hipotesis H_0 diterima atau menolak hipotesis H_1 dan hipotesis H_2 , yang berarti model yang digunakan dapat diterima karena data obzservasi dapat digunakan untuk memprediksi populasi. Melalui pengujian ini dapat dikatakan bahwa model yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengambilan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.

Tabel 4.8
Hasil *Hosmer and Lemeshow Test*

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	,016	2	,992

Sumber: Olah Data SPSS

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai chi-square sebesar 0,016 dengan nilai Sig. atau peluang sebesar 0,992. Melalui pengujian ini dapat diketahui, bahwa nilai signifikansi lebih besar daripada taraf signifikansi alpha sebesar 0,05 sehingga dapat diambil keputusan untuk menerima H_0 . Hal ini berarti bahwa tidak

ditemukan perbedaan antara populasi yang diprediksi dengan populasi yang diobservasi. Selain itu, dapat dibuktikan bahwa model regresi logistik dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut sampel yang ada untuk memprediksi populasi dan kemudian digunakan untuk pengambilan kesimpulan penelitian, serta dapat diketahui bahwa model telah cukup untuk menjelaskan data.

4.4.2 Overall Model Fit Test

Pengujian ini bertujuan untuk menilai apakah model yang dihipotesiskan telah *fit* atau sesuai dengan data. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai *-2 Log Likelihood* awal (*Block Number* = 0) dengan *-2 Log Likelihood* akhir (*Block Number* = 1). Adanya pengurangan pada nilai awal dan akhir tersebut menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan telah *fit* dengan data yang ada.

Tabel 4.9
Hasil -2 Log Likelihood awal
Iteration History^{a,b,c}

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients
		Constant
Step 0 1	286,378	,106
2	286,378	,106

a, Constant is included in the model.

b, Initial -2 Log Likelihood: 286,378

c, Estimation terminated at iteration number 2 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: Olah Data SPSS

Tabel 4.10
Hasil -2 Log Likelihood akhir

Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients		
			Constant	DTE	PP(1)
Step 1	1	284,781	-,278	,032	,452
	2	284,781	-,280	,032	,454
	3	284,781	-,280	,032	,454

a, Method: Enter

b, Constant is included in the model.

c, Initial -2 Log Likelihood: 286,378

d, Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: Olah Data SPSS

Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa nilai *-2 Log Likelihood* awal adalah sebesar 286,378 sesuai dengan yang diperoleh pada Tabel 4.9. Sedangkan nilai *-2 Log Likelihood* setelah variabel independen dimasukkan adalah 284,781, seperti yang tertera pada *Step 1* di Tabel 4.10. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model yang dihipotesiskan telah *fit* dengan data karena nilai -2LL awal lebih besar dari nilai -2LL akhirnya.

4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi ini serupa dengan pengujian R^2 pada persamaan regresi linear. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan kombinasi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	284,781 ^a	,056	,074

a, Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: Olah Data SPSS

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.11, dapat diketahui bahwa nilai R^2 sebesar 0,074 atau 7,4%, di mana dapat diartikan bahwa variabel Perencanaan Pajak (X1) dan variabel Beban Pajak Tangguhan (X2) mempengaruhi dan mampu menjelaskan variabel independen Manajemen Laba (Y) sebesar 7,4%, Untuk selebihnya, sekitar 92,6% dipengaruhi dan dapat dijelaskan dengan faktor-faktor lain diluar variabel-variabel yang diteliti. Nilai R^2 sebesar 0,074 ini juga dapat menjelaskan korelasi antara variabel X1 dengan Y dan variabel X2 dengan Y memiliki korelasi yang lemah. Serta, berdasarkan hasil uji signifikansi, asosiasi kedua pasang variabel tersebut tidak signifikan.

4.4.4 Uji Simultan (*Omnibus Test of Model Coefficient*)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang terdiri dari Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Manajemen Laba. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.12.

Tabel 4.12
Hasil Omnibus Test of Model Coefficient

Omnibus Tests of Model Coefficients		Chi-square	Df	Sig.
Step 1	Step	11,878	2	,036
	Block	11,878	2	,036
	Model	11,878	2	,036

Sumber: Olah Data SPSS

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.13, dapat dilihat bahwa nilai *Chi-square* sebesar 11,878 dengan signifikansi sebesar 0,036. Dengan melihat nilai signifikansi yang kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa penambahan variabel independen dapat memberikan pengaruh nyata terhadap model penelitian.

4.4.5 Regresi Logistik

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai peluang (signifikansi) dengan tingkat signifikansi alpha sebesar 0,05 untuk menentukan penerimaan atau penolakan H_0 . Nilai signifikansi dapat dilihat berdasarkan hasil pengujian regresi logistik berikut.

Tabel 4.13
Hasil Regresi Logistik

Variables in the Equation		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	PP	,454	,361	1,581	1	,209	1,574
	DTE	,032	,284	,013	1	,910	1,033
	Constant	-,280	,378	,548	1	,459	,756

a, Variable(s) entered on step 1: PP, DTE.

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan Tabel 4.13, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel independen sebesar 0,209 untuk variabel Perencanaan Pajak dan 0,910 untuk variabel Beban Pajak Tangguhan. Nilai signifikansi dari kedua variabel independen lebih besar dari tingkat signifikansi alpha sebesar 0,05, sehingga menolak H alternatif. Melalui hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh pada variabel dependen ditolak atau kedua variabel independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Selain itu, dari nilai B pada hasil pengujian di atas, maka dapat diperoleh persamaan regresi logistik sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ln \frac{EM}{1-EM} &= \alpha + \beta_1 TRR_{it} + \beta_2 DTE_{it} + \varepsilon \\ &= -0,280 + 0,454 TRR_{it} + 0,032 DTE_{it} + \varepsilon \end{aligned}$$

Mengacu pada persamaan tersebut, dapat diketahui bahwa Perencanaan Pajak memiliki nilai koefisien sebesar 0,454 dan Beban Pajak Tangguhan sebesar 0,032. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi perencanaan pajak suatu perusahaan, maka semakin besar pula peluang perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Begitu juga dengan tingkat Beban Pajak Tangguhan yang juga dapat meningkatkan peluang perusahaan melakukan manajemen laba.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa variabel Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba, khususnya pada perusahaan non-manufaktur yang dijadikan obyek

penelitian. Apabila ditinjau dari nilai *p-value* perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari taraf signifikansi alpha 5% yang mengimplikasikan bahwa baik perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Namun dari hasil regresi logistik, secara umum dapat diketahui jika semakin tinggi perencanaan pajak suatu perusahaan maka semakin besar peluang perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Begitu juga dengan beban pajak tangguhan di mana semakin tinggi nilai beban pajak tangguhan akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Berdasarkan hasil ini, dapat diketahui bahwa kedua variabel tersebut dapat digunakan sebagai indikator dalam mendeteksi manajemen laba, meskipun pengaruhnya lemah terhadap manajemen laba.

Seperti yang diketahui dari hasil pengujian R^2 yang bernilai positif dengan nilai sebesar 0,074 atau 7,4%, di mana dapat diartikan bahwa variabel manajemen laba dapat dijelaskan oleh variabel perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan sebesar 7,4% saja. Sedangkan 92,6% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Selain itu, dari hasil perhitungan *mean* pada variabel dependen manajemen laba, menunjukkan angka positif yang apabila dijelaskan sesuai dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Phillips *et al.* (2003) menunjukkan usaha manajemen laba yang dilakukan perusahaan untuk menghindari penurunan laba. Lebih lanjut Philips *et al.* (2003) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peningkatan beban pajak tangguhan yang menjadi elemen di dalam perencanaan pajak meningkatkan peluang

pengelolaan laba untuk menghindari penurunan laba, yang mendukung bahwa perencanaan pajak berguna dalam memprediksi manajemen laba tersebut. Hal ini berkaitan dengan kecenderungan perusahaan untuk melewati *earnings thresholds* yang disebut juga dengan titik perubahan laba nol. Hasil penelitian yang menolak hipotesis alternatif menunjukkan bahwa manajemen pada perusahaan-perusahaan non-manufaktur menggunakan perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan sebagai cara untuk menghindari penurunan laba, bukan untuk meningkatkan laba melewati *earnings thresholds* sebagai salah satu indikator yang dilihat oleh pihak pemegang kepentingan atau eksternal untuk menilai kinerja perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setiowati (2007) dan Aditama (2013). Namun, tidak sejalan dengan penelitian Yulianti (2005), Sumomba (2010), Widiastuti (2011), Herdawati (2015), dan Sibarani (2015) yang menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian. Serta tidak sejalan dengan penelitian Astutik (2016) pada perusahaan *food and beverages*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap variabel-variabel penelitian yang menjadi perhatian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan non-manufaktur. Hal tersebut dikarenakan perusahaan-perusahaan non-manufaktur menggunakan perencanaan pajak sebagai cara untuk menghindari penurunan laba, bukan untuk meningkatkan laba sehingga dapat melewati *earnings thresholds*. Di lain sisi, semakin tinggi tingkat perencanaan pajak perusahaan maka semakin tinggi peluang perusahaan dalam melakukan manajemen laba.
2. Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan manajemen laba pada perusahaan non-manufaktur. Hal ini dikarenakan sifat beban pajak tangguhan sebagai salah satu pengurang laba dalam laporan laba rugi perusahaan, sedangkan manajemen laba yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk menghindari penurunan laba. Namun, secara umum dapat diketahui bahwa semakin besar nilai beban pajak tangguhan maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk melakukan manajemen laba.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian ini, antara lain:

1. Sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan-perusahaan non-manufaktur yang bergerak di bidang-bidang tertentu sehingga hasil penelitian tidak dapat digunakan sebagai dasar generalisasi.
2. Lingkup penelitian yang sempit karena hanya berfokus pada perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan dalam mendeteksi probabilitas perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Sedangkan masih banyak variabel-variabel lain, baik yang berhubungan dengan akun pajak pada khususnya atau akun-akun lain, yang dapat digunakan dalam mendeteksi manajemen laba perusahaan.
3. Kemungkinan adanya peraturan-peraturan tertentu dalam pelaporan keuangan perusahaan non-manufaktur dengan lini bisnis yang berbeda, seperti pengakuan akrual, serta peraturan-peraturan lain terkait perpajakan pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa, investasi, atau lini bisnis non-manufaktur lainnya, yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian secara keseluruhan.
4. Tidak banyak perubahan yang terjadi baik dari sisi kebijakan akuntansi atau pun peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang dapat

mempengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan manajemen laba dalam periode yang diamati.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti memiliki beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pemilihan sampel dengan kategori perusahaan yang lebih luas atau mencakup seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia akan memberikan kesempatan untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat menggambarkan pengaruh yang terjadi secara general. Namun, perlu diperhatikan juga kemungkinan adanya peraturan-peraturan khusus dalam penyajian laporan keuangan pada kategori perusahaan yang berbeda.
2. Dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan pendekatan yang sama namun menggunakan variabel-variabel lain selain perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan, salah satunya melalui diskresi akrual. Selain itu, dapat dilakukan kajian lebih dalam dengan memisahkan perusahaan yang memiliki laba bersih yang bernilai positif dan laba bersih yang bernilai negatif.
3. Melakukan kajian lebih dalam mengenai peraturan-peraturan khusus yang mungkin dapat mempengaruhi pelaporan laba pada perusahaan-perusahaan non-manufaktur. Hal ini mengingat terdapat beberapa aturan khusus terutama

yang berkaitan dengan pelaporan pajak pada perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang jasa, investasi, dan perusahaan non-manufaktur lainnya.

4. Memperluas periode pengamatan untuk memperkuat hipotesis beban pajak tangguhan berpengaruh pada manajemen laba, mengingat bahwa beban pajak tangguhan yang diakui dalam satu periode tidak hanya berasal dari kewajiban pajak tangguhan pada periode tersebut, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban pajak tangguhan dari periode-periode sebelumnya yang dilunasi atau dibayar pada periode bersangkutan.

